LAMPIRAN I

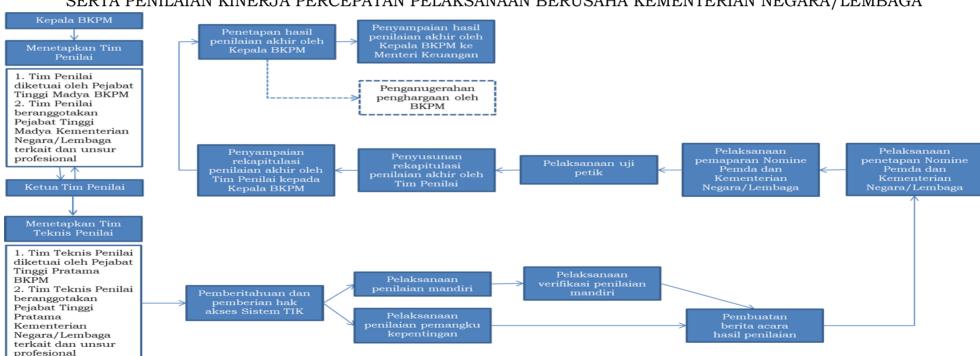
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PENILAIAN KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA PEMERINTAH DAERAH SERTA KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

#### ALUR TAHAPAN PENILAIAN KINERJA

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA PEMERINTAH DAERAH SERTA PENILAIAN KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA



Ttd.

LAMPIRAN II

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PENILAIAN KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA PEMERINTAH DAERAH SERTA KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

# PEMBOBOTAN KOMPONEN PENILAIAN KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

# DAN KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA PEMERINTAH DAERAH SERTA KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

#### I. Penilaian Mandiri Kinerja PTSP Pemda

No.	Kriteria	Provinsi	Kabupaten/Kota
1.	Kelembagaan	35%	35%
2.	Sumber Daya Manusia	25%	25%
3.	Sarana dan Prasarana Kerja	20%	20%
4.	Capaian Realisasi Proyek Investasi	10%	10%
5.	Inovasi	10%	10%
Pe	enilaian Mandiri Kinerja PTSP Pemda	100%	100%

#### II. Penilaian Mandiri Kinerja PPB Pemda

No.	Kriteria	Provinsi	Kabupaten/Kota
1.	Penyusunan peraturan daerah atau		
	peraturan kepala daerah yang		
	diamanatkan oleh peraturan		
	perundang-undangan di bidang	25%	25%
	percepatan pelaksanaan berusaha	23%	2370
	serta peraturan pelaksanaan perizinan		
	berusaha terintegrasi secara		
	elektronik		

2.	Reformasi pelaksanaan perizinan				
	berusaha dan pengawalan realisasinya	alan realisasinya			
	sesuai ketentuan peraturan	40%	40%		
	perundang-undangan				
3.	Koneksi Pemda dengan sistem <i>Online</i>	35%	35%		
	Single Submission	3370	3370		
P	Penilaian Mandiri Kinerja PPB Pemda	100%	100%		

## III. Penilaian Mandiri Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga

No.	Kriteria	Provinsi	Kabupaten/Kota
1.	Penyusunan norma, standar, prosedur		
	dan kriteria perizinan berusaha sesuai		
	kewenangannya yang diamanatkan		
	oleh peraturan perundang-undangan	25%	25%
	di bidang percepatan pelaksanaan	23 /0	2370
	berusaha serta peraturan pelaksanaan		
	perizinan berusaha terintegrasi secara		
	elektronik		
2.	Reformasi pelaksanaan perizinan		
	berusaha dan pengawalan realisasinya	40%	40%
	sesuai ketentuan peraturan	4070	4070
	perundang-undangan		
3.	Koneksi Pemda dengan sistem <i>Online</i>	35%	35%
	Single Submission	3370	3370
Peni	laian Mandiri Kinerja PPB Kementerian	100%	100%
	Negara/Lembaga		

## IV. Penilaian Kinerja PTSP Pemda oleh Pemangku Kepentingan

No.	Penilaian Kinerja PTSP Pemda	Provinsi	Kabupaten/Kota
1.	Penilaian Mandiri Kinerja PTSP Pemda	80%	75%
2.	Penilaian Organisasi Pengusaha	20%	15%
3.	Penilaian PTSP Pemda Provinsi		
	terhadap PTSP Pemda	-	10%
	Kabupaten/Kota		
	Penilaian Kinerja PTSP Pemda	100%	100%

## V. Penilaian Kinerja PTSP dan PPB Pemda serta Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga

No.	Penilaian Kinerja	Pemerintah	Kementerian
		Daerah	Negara/Lembaga
1.	Penilaian Kinerja PTSP	70%	-
2.	Penilaian Kinerja PPB	30%	100%
	Penilaian Kinerja	100%	100%

#### VI. Penilaian Pemda dan Kementerian Negara/Lembaga untuk Tahapan Pemaparan Bagi Nomine

		P	emda	Kementerian	
No.	Penilaian Kinerja	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Negara/Lembaga	
1.	Penilaian Kinerja PTSP	60%	60%	-	
2.	Penilaian Kinerja PPB	0070	3070	60%	
3.	Penilaian Pemaparan	40%	40%	40%	
Penilaian Kinerja		100%	100%	100%	

#### VII. Penilaian Pemda dan Kementerian Negara/Lembaga untuk Tahapan Uji Petik Bagi Nomine

		P	emda	Kementerian
No.	Penilaian Kinerja			Negara/Lembaga
		Provinsi	Kabupaten/ Kota	
1.	Penilaian Kinerja PTSP	50%	50%	-
2.	Penilaian Kinerja PPB	0070	0070	50%
3.	Penilaian Uji Petik	50%	50%	50%
Penilaian Kinerja		100%	100%	100%

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

LAMPIRAN III

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN

MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PENILAIAN KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA PEMERINTAH DAERAH SERTA KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

#### LEMBAR PENILAIAN MANDIRI UNTUK KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH DAERAH

#### A. IDENTITAS

Nama daerah				
Nama daeran Nomenklatur penyelenggara PTSP		:	•••••	
		•	•••••	
Kesesuaian pada Permendagri Tahun	Nomor	:	□ Sesuai	□ Belum sesuai
100 Tahun 2016				
			Disesuaikan sejak tahun	:
Tahun pembentukan PTSP		:		
Alamat kantor		:		
			Kecamatan:	Kota/Kabupaten:
			Provinsi :	
			Kode pos :	
Titik koordinat kantor (Google Earth)		:	Garis bujur	
			Garis lintang	
Nomor telepon/faksimili		:		
Situs		:		
Alamat surat elektronik ( <i>e-mail</i> )		:		
Media social		:	1	
			2	
Jumlah SDM		:	Bidang Pelayanan :	
			Bidang Dalaks :	

Jumlah perizinan berusaha yang dilayani	:	
Jumlah aktivitas pendukung perizinan berusaha yang dilayani	:	
Nama Kepala Dinas	:	
Contact Person	:	1
		2

#### B. LEMBAR PENILAIAN MANDIRI

k	Triteria Penilaian	Ind	ikator Penilaian	Tolok Ukur Penilaian (Bagaimana setiap indikator dinilai)	Bobot Penilaian (Bagaimana setiap indikator diberi skor)
1	Kelembagaan	a.	Integritas	Menilai ketersediaan	Semua ada SOP = 25, Sebagian
				SOP untuk aktivitas	ada SOP = 10,
				perizinan berusaha dan	Tidak ada SOP = 0
				aktivitas pendukung	
				perizinan berusaha	
				Menilai kepatuhan pada	Semua SOP dipatuhi = 25,
				SOP yang ada	Sebagian SOP dipatuhi = 10,
					Tidak ada SOP yang dipatuhi = 0
				Menilai kepatuhan pada	Semua NSPK dipatuhi = 25,
				NSPK	Sebagian NSPK dipatuhi = 10,
				Kementerian/Lembaga	Tidak ada NSPK yang dipatuhi =
					0
				Menilai Ketersediaan SLA	Ada SLA = 25, Sebagian ada SLA
				(Service Level Agreement)	= 10,
					Tidak ada SLA = 0
				Ketersediaan pakta	Ada pakta integritas = 25,
				integritas	Sebagian ada = 10,
					Tidak ada pakta integritas = 0
		b.	Kewenangan	Menilai kesesuaian	Sesuai = 25,
				nomenklatur dengan	Tidak sesuai = 0
				peraturan perundang-	
				undangan	
				Menilai jumlah	Semua = 25,
				pelimpahan wewenang	Sebagian = 10,
					Tidak ada = 0
				Menilai keberadaan Tim	Tim Teknis ada seluruhnya = 25,
				Teknis	Tim Teknis ada sebagian = 10,
					Tim Teknis tidak ada = 0

				Menilai pembebasan dari	Tidak ada retribusi = 25,
				pembebanan retribusi	Ada retribusi = 0.
				daerah kepada PTSP	
		c.	Soliditas	Menilai banyaknya	Semua masalah selesai = 25,
				masalah yang dapat	Sebagian masalah selesai = 10,
				diselesaikan	Tidak ada masalah yang selesai =
				dibandingkan jumlah	0.
				masalah yang ada.	
				Menilai penyelesaian	Semua masalah diselesaikan
				masalah secara mandiri	secara mandiri = 25,
				dibandingkan seluruh	Sebagian masalah diselesaikan
				masalah yang	secara mandiri = 10,
				diselesaikan	Tidak ada masalah yang
					diselesaikan secara mandiri = 0.
				Kejelasan waktu	Ada kejelasan waktu = 25,
				penyelesaian masalah	Tidak ada kejelasan waktu = 0.
		d.	Kesinambung-	Menilai SKM dan IKM	SKM sudah dilakukan, IKM di
			an		atas 75 = 25,
					SKM sudah dilakukan, IKM di
					bawah 75 = 10,
					SKM belum dilakukan = 0.
				Menilai frekuensi	Lebih dari 2 kali = 25,
				pelaksanaan SKM per	2 kali = 10,
				tahun	1 kali = 5,
					Tidak pernah = 0.
		e.	Tanggung-	Menilai ketersediaan	Ada, daring = 25,
			jawab	mekanisme pengaduan	Ada, luring = 10, Tidak ada = 0.
				Menilai ketersediaan	Ada, daring = 25,
				layanan <i>help desk</i>	Ada, luring = 10,
					Tidak ada = 0.
				Menilai ketersediaan	Ada, daring =25,
				formulir pengaduan	Ada, luring = 10,
					Tidak ada = 0.
2	Sumber days	a a.	Kompetensi	Menilai jumlah SDM	>80% = 25,
	manusia		penanaman	PTSP (Kepala Dinas,	>50% sd 80 = 15,
			modal	Bidang Pelayanan	>25 sd 50% = 10,
				Perizinan Berusaha dan	<25 sd 1 = 5.
				Bidang Dalaks) yang	Tidak ada = 0.
				memiliki Sertifikat Diklat	
				PTSP Tingkat Dasar	
				ВКРМ	

			Menilai jumlah SDM	·
			PTSP (Kepala Dinas,	>25 s/d 50% = 10,
			Bidang Pelayanan	<25 sd 1 = 5.
			Perizinan Berusaha dan	Tidak ada = 0.
			Bidang Dalaks) yang	
			memiliki Sertifikat Diklat	
			PTSP Tingkat Lanjut	
			BKPM	
			Menilai jumlah SDM	50% = 25,
			PTSP (Kepala Dinas,	>25 sd 50% = 10,
			Bidang Pelayanan	<25 sd 1 = 5.
			Perizinan Berusaha dan	Tidak ada = 0.
			Bidang Dalaks) yang	
			memiliki Sertifikat Diklat	
			PTSP Sektoral BKPM	
	b.	Pengalaman di	Menilai pengalaman	>50% = 25,
		bidang	SDM PTSP (Kepala	>25 sd 50% = 10,
		penanaman	Dinas, Bidang Pela-	<25 sd 1 = 5.
		modal	yanan Perizinan Ber-	Tidak ada = 0.
			usaha dan Bidang	
			Dalaks) dengan masa	
			kerja minimal 2 tahun di	
			PTSP	
			Menilai status	Semua PNS = 25,
			kepegawaian SDM PTSP	Sebagian PNS = 10.
			(Kepala Dinas, Bidang	
			Pelayanan Perizinan	
			Berusaha dan Bidang	
			Dalaks)	
	c.	Kompetensi	Menilai jumlah SDM	>80% = 25,
		keahlian	PTSP (Kepala Dinas,	>50% sd 80 = 15,
		lainnya	Bidang Pelayanan	>25 sd 50% = 10,
			Perizinan Berusaha dan	<25 sd 1 = 5.
			Bidang Dalaks) yang	Tidak ada = 0.
			memiliki sertifikat	
			bahasa asing	
			Menilai jumlah SDM	>80% = 25,
			PTSP (Kepala Dinas,	>50% sd 80 = 15,
			Bidang Pelayanan	>25 sd 50% = 10,
			Perizinan Berusaha dan	<25 sd 1 = 5.
			Bidang Dalaks) yang	Tidak ada = 0.
			memiliki sertifikat diklat	
			lain	
			14411	

3	Sarana dan	a.	Sistem	Menilai ketersediaan	Ada, kondisi baik dan cukup = 25,
	prasarana kerja		pelayanan	prasarana di ruang-an	Ada, kondisi kurang baik/kurang
				front office (Loket	=10,
				Penerimaan, Loket	Tidak ada = 0.
				Penyerahan, Loket	
				Pembayaran, Ruang	
				Layanan Informasi,	
				Ruang Layanan	
				Pengaduan, Ruang	
				Layanan Konsultasi,	
				Ruang Layanan Ber-	
				bantuan, Ruang Layanan	
				Mandiri, Ruang Layanan	
				Prioritas)	
				Menilai ketersediaan	Ada, kondisi baik dan cukup = 25,
				prasarana di ruangan	Ada, kondisi kurang baik/ kurang
				Back office (ruang rapat	=10,
				dan ruang pemrosesan	Tidak ada = 0.
				izin)	
				Menilai ketersediaan	Ada, kondisi baik dan cukup = 25,
				prasarana di ruangan	Ada, kondisi kurang baik/ kurang
				pendukung (Ruang	=10,
				Tunggu, Toilet, Tempat	,
				parkir)	
				Menilai ketersedian	Ada, kondisi baik dan cukup = 25,
				sarana (Komputer, UPS,	Ada, kondisi kurang baik/kurang
				Server, Mesin <i>Printer</i> ,	=10,
				Mesin Foto <i>copy</i> ,	Tidak ada = 0.
				Telephone, mesin	
				antrean, Kotak Saran,	
				Wifi, Mesin (media)	
				Survei Kepuasan	
				Layanan) di ruang-ruang	
				Fornt Office, Back Office	
				dan R. pendukung (tidak	
				semua, seperti di ruang	
				parkir misalnya)	
				Ketersediaan Mall	Ada = 25,
				Pelayanan Publik	Tidak ada = 0.
		b.	Media	Menilai ketersediaan	Ada, kondisi baik dan cukup = 25,
		~.	informasi	media informasi, seperti	Ada, kondisi kurang baik/ kurang
				Maklumat Pelayanan	=10,
				Publik, Papan Nama	Tidak ada = 0.
				Kantor, Petunjuk	
				indicor, i cturijak	

				(Danduan) Tarrana	
				(Panduan) Layanan,	
				Leaflet/ Brosur Jenis	
				Layanan, Website PTSP	
				Menilai kualitas format	Digital = 25,
				(Konvensional/Digital)	Konvensional = 10.
				dari media informasi	
				yang digunakan	
				(Maklumat Pelayanan	
				,	
				Publik, Tanda Arah	
				Lokasi (Google Maps	
				Point), Papan Nama	
				Kantor, Petunjuk	
				(Panduan) Layanan,	
				Leaflet/Brosur Jenis	
				Layanan, Website PTSP),	
				media sosial	
4	Consist		Dorgantoss		>100% = 25,
4	Capaian	a.	Persentase	<u>*</u>	ŕ
	realisasi proyek		capaian target	capaian target realisasi	
	penanaman		realisasi nilai	nilai penanaman modal	
	modal		penanaman	tahun sebelumnya	<79,99% = 0
			modal		
		b.	Persentase	Menilai persentase	>100% = 25,
			capaian target	capaian target realisasi	80% sd 99,9% = 10,
			realisasi	penyerapan tenaga kerja	70% sd 79,99% = 5,
			penyerapan	tahun sebelumnya	<79,99% = 0
			tenaga kerja		
		c.	Upaya Pemda	Menilai kegiatan	>100 UKM = 25,
			dalam	dilakukan untuk	,
			mendorong	mendorong kemitraan	>10 sd 50 = 10,
			_	S	, and the second
			kemitraan	UMK	>10 =5,
			investasi besar		Tidak ada = 0
			dengan usaha	Menilai ketersediaan	Tersedia, dan dimanfaatkan =
			mikro, kecil,	data UMK yang siap	25,
			dan menengah	bermitra dan yang perlu	Tersedia tidak dimanfaatkan =10,
				dibina	tidak tersedia = 0
				Menilai ketersediaan	Ada peraturan, implementasi
				peraturan untuk	baik = 25,
				memitrakan UMK	Ada peraturan, belum
					implementasi baik = 10,
					Tidak ada peraturan = 0
5	Inovasi	a.	Jumlah	Menilai jumlah inovasi	-
		~.	inovasi	yang dilakukan dalam 1	
			111014001	tahun terakhir	<3 = 5,
				tanun terakini	7 = 5, Tidak ada = 0.
					παακ ααα = 0.

b.	Implementasi	Menilai k	continuitas	Dilakukan, terjadwal = 25,
	inovasi	inovasi yang di	ilakukan	Dilakukan, tidak terjadwal = 10,
				Belum dilakukan = 0.
c.	Kemanfaatan	Menilai l	banyaknya	Ada bukti = 25,
	inovasi ke	masyarakat	yang	Bukti kurang = 10,
	masyarakat	mengakses	inovasi	Tidak ada bukti = 0.
	dan pelaku	tersebut/tahur	n	
	usaha	Menilai	penilaian	Ada data, respon baik = 25;
		masyarakat	terhadap	Ada data, respon kurang baik =
		inovasi dilakukan		10;
				Tidak ada data = 0.

Ttd.

LAMPIRAN IV

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PENILAIAN KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA PEMERINTAH DAERAH SERTA KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

# LEMBAR PENILAIAN ORGANISASI PENGUSAHA UNTUK PENILAIAN KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

#### A. PROFIL ORGANISASI PENGUSAHA

1	Nama organisasi	:			
2	Alamat kantor	:			
3	Alamat surat elektronik (e-mail)	:			
4	Ketua organisasi	:			
5	Telepon/faksimili	:			
7	Jumlah anggota aktif	:			
8	Kepengurusan	:	a. Ada, aktif	b. Ada, kurang aktif	c. Ada, tidak aktif
9	Program kerja	:	a. Ada, berjalan	b. Ada, kurang berjalan	c. Ada, tidak berjalan
10	Koordinasi dengan PTSP Pemda	:	a. Ada, rutin	b. Ada, tidak rutin	c. Tidak pernah
11	Kegiatan dengan PTSP Pemda	:	a. Ada, banyak	d. Ada, sedikit	c. Tidak ada
12	Koordinasi dengan PTSP Pemda terakhir kali (Jika jawaban poin 10 "Ada")	:	a. 1 bulan terakhir	b. 6 bulan terakhir	c. Lebih dari 6 bulan yang lalu

#### B. LEMBAR PENILAIAN PEMBANDING KINERJA PTSP PEMDA OLEH ORGANISASI PENGUSAHA

			PENILAIAN	
No	DIMENSI KINERJA LAYANAN PTSP PEMDA	(Masing-masing	kolom, diisi der	ngan rentang nilai
			1 sd 10)	
Α	TANGIBLE/TAMPILAN	Tingkat	Harapan	Kinerja saat ini
		kepentingan		
1	Kelengkapan sarana dan prasarana di			
	PTSP Pemda			
2	Kondisi fisik sarana dan prasarana di PTSP			
	Pemda			
3	Penampilan fisik SDM PTSP Pemda			
В	EMPATHY/EMPATI	Tingkat	Harapan	Kinerja saat ini
		kepentingan		
1	Kemudahan menemukan kantor PTSP			
	Pemda melalui papan petunjuk/peta			
	internet (Google Map)			

	T			
2	Kemudahan berkomunikasi dengan PTSP			
	Pemda (secara langsung/melalui media			
	komunikasi)			
3	Kejelasan prosedur/tata cara perizinan			
	berusaha di PTSP Pemda			
4	Kualitas pelayanan pengaduan di PTSP			
	Pemda			
5	Ketersediaan terobosan pelayanan di PTSP			
	Pemda			
6	Kualitas terobosan pelayanan di PTSP			
	Pemda			
7	Kepedulian PTSP terhadap kepatuhan			
	perusahaan (LKPM, Pemenuhan Komitmen			
	dan lain sebagainya)	m: 1	***	771
С	RELIABILITY/KETERANDALAN	Tingkat	Harapan	Kinerja saat ini
1	T	kepentingan		
1	Kompetensi SDM PTSP Pemda			
2	Ketersediaan data dan informasi terkait			
	penanaman modal (tata ruang, peta			
	potensi, dan lain sebagainya)			
3	Akurasi informasi yang disampaikan oleh			
	PTSP Pemda			
4	Fasilitasi rencana investasi oleh PTSP			
	Pemda	m: t		771
D	RESPONSIVENESS/DAYA TANGGAP	Tingkat	Harapan	Kinerja saat ini
		kepentingan		
1	Kecepatan pelayanan perizinan berusaha			
	oleh PTSP Pemda			
2	Kecepatan pelayanan pengaduan di PTSP			
	Pemda			
3	Kesigapan penyelesaian masalah oleh			
	PTSP Pemda			
4	Kesigapan PTSP Pemda untuk			
	menindaklanjuti rekomendasi dan			
	masukan yang diberikan			
5	Kesigapan PTSP Pemda dalam mengawal			
	proyek investasi besar	m: 1	***	771
E	ASSURANCE/KEPASTIAN	Tingkat	Harapan	Kinerja saat ini
	77	kepentingan		
1	Kepastian persyaratan dalam pengurusan			
	perizinan berusaha di PTSP Pemda			
2	Ketepatan waktu dalam pengurusan			
2	perizinan berusaha di PTSP Pemda			
3	Kepastian prosedur/tata cara dalam			
	mengurus perizinan berusaha di PTSP Pemda			
4	Kepastian biaya pelayanan perizinan			
+	berusaha di PTSP Pemda			
F	TOTAL KINERJA	Tingkat	Harapan	Kinerja saat ini
1.	10111D MINDION	kepentingan	Tiarapan	minerja saat iiii
1	Secara umum, bagaimana kualitas	repenningan		
-	pelayanan perizinan berusaha yang			
	diberikan oleh PTSP Pemda?			
2	Secara umum, bagaimana kinerja PTSP			
4	Pemda dalam mendukung kemudahan			
	berusaha?			
3	Secara khusus, bagaimana kualitas SDM			
	yang dimiliki PTSP Pemda dalam			
	memberikan pelayanan perizinan			
	berusaha?			
L		I	I	I

4	Secara khusus, bagaimana kualitas sarana				
	dan prasarana yang digunakan PTSP				
	Pemda?				
G. PI	ERSEPSI TERHADAP PTSP PEMDA YANG				
DINI	LAI DIBANDINGKAN PTSP PEMDA LAINNYA				
Diba	ndingkan dengan PTSP Pemda lain yang pern	ah dikunjungi,			
baga	imana pendapat Bapak/Ibu terhadap :				
1	Kualitas pelayanan perizinan berusaha	O Lebih baik	O Sama saja	O Lebih buruk	
	PTSP Pemda yang dinilai				
2	Integritas PTSP Pemda (bebas KKN) yang	O Lebih baik	O Sama saja	O Lebih buruk	
	dinilai				
3	Kualitas kinerja PTSP Pemda yang dinilai,	O Lebih baik	O Sama saja	O Lebih buruk	
	secara umum				
Diba	ndingkan dengan tahun sebelumnya, bagaima	ana pendapat Bapak/Ibu terhadap :			
1	Peran PTSP Pemda dalam peningkatan	O Lebih baik	O Sama saja	O Lebih buruk	
	investasi di daerah				
2	Kualitas pelayanan perizinan berusaha	O Lebih baik	O Sama saja	O Lebih buruk	
	yang diberikan PTSP Pemda kepada				
	masyarakat/pelaku usaha di daerah				
3	Kemudahan berusaha yang dirasakan	O Lebih baik	O Sama saja	O Lebih buruk	
	pelaku usaha atas kinerja PTSP Pemda				
Sara	n dan Masukan (Isian)				
1	Dalam hal pelayanan perizinan berusaha				
	yang diberikan PTSP Pemda				
2	Dalam hal SDM PTSP Pemda				
3	Dalam hal sarana dan prasarana yang				
	digunakan PTSP Pemda				

Ttd.

LAMPIRAN V

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PENILAIAN KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA PEMERINTAH DAERAH SERTA KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

#### PENILAIAN MANDIRI UNTUK KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA (PPB) PEMERINTAH DAERAH

	Kriteria Penilaian	In	dikator Penilaian	Tolok Ukur Penilaian (Bagaimana setiap indikator dinilai)	Bobot Penilaian (Bagaimana setiap indikator diberi skor)
1	Penyusunan peraturan daerah atau peraturan kepala daerah yang diamanatkan oleh	a.	Prosedur operasional standar perizinan berusaha melalui sistem OSS	Menilai ada tidaknya dokumen prosedur operasional standar Perizinan Berusaha melalui sistem OSS	Ada lengkap =25, Tidak ada =0
	peraturan perundang- undangan di bidang percepatan pelaksanaan berusaha serta peraturan			Menilai aksesibilitas dokumen prosedur operasional standar Perizinan Berusaha melalui sistem OSS	Dapat diakses publik = 25, Dapat diakses dengan otorisasi =10, Tidak dapat diakses =0
	pelaksanaan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	b.	Prosedur operasional standar perizinan berusaha melalui sistem pendukung	Menilai ada tidaknya dokumen prosedur operasional standar Perizinan Berusaha melalui sistem pendukung sistem OSS	Ada =10, Tidak ada =0
			sistem OSS	Menilai aksesibilitas dokumen prosedur operasional standar Perizinan Berusaha melalui sistem pendukung sistem OSS	Dapat diakses publik = 25, Dapat diakses dengan otorisasi =10, Tidak dapat diakses =0
		c.	Evaluasi implementasi prosedur operasional standar pelayanan	Menilai ada tidaknya dokumen evaluasi prosedur operasional standar Perizinan Berusaha melalui sistem OSS	Ada =10, Tidak ada =0

			perizinan	Menilai aksesibilitas	Danat dialogo muhlila
			perizinan berusaha	dokumen evaluasi	Dapat diakses publik = 25,
				prosedur operasional	Dapat diakses
				standar Perizinan	dengan otorisasi
				Berusaha melalui sistem	=10,
				OSS	Tidak dapat diakses = 0.
				Menilai ada tidaknya	Ada =10,
				dokumen evaluasi	Tidak ada =0
				prosedur operasional	
				standar Perizinan Berusaha melalui sistem	
				pendukung sistem OSS	
				Menilai aksesibilitas	Dapat diakses publik
				dokumen evaluasi	= 25,
				prosedur operasional	Dapat diakses
				standar Perizinan	dengan otorisasi
				Berusaha melalui sistem	=10,
				pendukung sistem OSS	Tidak dapat diakses = 0.
		d.	Tindak lanjut	Menilai dokumen tindak	Ada =10,
			evaluasi	lanjut evaluasi prosedur	Tidak ada =0
				operasional standar	
				Perizinan Berusaha melalui sistem OSS	
				Menilai dokumen tindak	Ada =10,
				lanjut evaluasi prosedur	Tidak ada =0
				operasional standar	
				Perizinan Berusaha	
				melalui pendukung sistem sistem OSS	
2	Reformasi	a.	Organisasi dan	Menilai ketersediaan tim	Tersedia dengan SK
	pelaksanaan		program kerja	teknis internal	= 25, Tersedia tanpa
	perizinan berusaha				SK = 10, $Tidak$
	dan pengawalan			M :1-: 1 +:	tersedia = 0
	realisasinya sesuai ketentuan peraturan			Menilai operasional tim teknis internal	Selama hari kerja = 25, 2-4 hari kerja =
	perundang-			tekins internar	10, 1 hari kerja = 5,
	undangan				Tidak ada = 0
				Menilai kecukupan dan	Cukup dan ada
				keterwakilan Tim Teknis Internal	keterwakilan = 25,
				Internal	Cukup namun kurang ada
					keterwakilan = 10,
					Tidak cukup = 5
				Menilai ketersediaan	Ada dan sangat
				program kerja dalam	jelas = 25, Ada,
				rangka reformasi	kurang jelas = 10,
				perizinan berusaha Menilai ada tidaknya	Tidak ada = 0 Ada dan rutin = 25,
				koordinasi dengan 1.	Ada, tidak rutin =
				K/L, 2. Pemda lain, 3.	10, Tidak ada = 0
				PTSP Pemda di	,
				wilayahnya, terkait	
				reformasi perizinan	
				berusaha Manilai Iraharadaan	Ada dan mitir - 05
				Menilai keberadaan kegiatan evaluasi	Ada dan rutin = 25, Ada, tidak rutin =
				internal	10, Tidak ada = 0
	•	i	1		-,

		1	T 1		A 1
		b.	Identifikasi	Menilai aktivitas	Ada dan rutin = 25,
			peraturan	identifikasi peraturan	Ada, tidak rutin =
			perizinan	perizinan berusaha yang	10, Tidak ada = 0
			berusaha	perlu direformasi	
				Menilai aktivitas	Ada dan rutin = 25,
				identifikasi pelaksanaan	Ada, tidak rutin =
				perizinan berusaha yang	10, Tidak ada = 0
				perlu direformasi	
				Menilai aktivitas	Ada dan rutin = 25,
				identifikasi	Ada, tidak rutin =
				permasalahan terkait	10, Tidak ada = 0
				perizinan berusaha	
		c.	Inventarisasi	Menilai keberadaan	Ada dan lengkap=
			peraturan	dokumentasi kegiatan	25, Ada, tidak
			perizinan		lengkap = 10 dan
			berusaha		Tidak ada = 0
			Scrudalia	Menilai keberadaan	Ada dan lengkap=
				dokumentasi identifikasi,	25, Ada, tidak
				evaluasi dan	lengkap = 10 dan
					Tidak ada = 0
				pelaksanaan peraturan perizinan berusaha	Tiuun uuu – U
				Menilai aksesibilitas	Danat dialasa1-1'1
					Dapat diakses publik
				kegiatan dan laporan	= 25, Dapat diakses
				kegiatan	internal = 10, Tidak
					dapat diakses = 0
				Menilai penggunaan	Menggunakan
				teknologi informasi	teknologi informasi =
				dalam dokumentasi dan	25, Konvensional = 0
				inventarisasi	
		d.	Deregulasi	Menilai jumlah	Ada rekomendasi
			peraturan	rekomendasi yang telah	pada setiap
			perizinan	dikeluarkan dari daftar	identifikasi = 25,
			berusaha	identifikasi peraturan	Ada rekomendasi
				perizinan berusaha	pada sebagian
					identifikasi = 10,
					Tidak ada
					rekomendasi = 0
		f.	Debirokratisasi	Menilai aktivitas	Ada dan rutin = 25,
			peraturan	mendorong kemudahan	Ada, tidak rutin =
			perizinan	perizinan berusaha	10, Tidak ada = 0
			berusaha	Menilai aktivitas terkait	Ada dan rutin = 25,
				upaya mengurangi	Ada, tidak rutin =
				waktu/biaya perizinan	10, Tidak ada = 0
				berusaha	
				Menilai aktivitas	Ada dan sistematis =
				pengawasan dalam	25, Ada namun tidak
				pelaksanaan perizinan	sistematis = 10,
				berusaha	Tidak ada = 0
				Menilai aktivitas	Ada dan terpogram =
				pendampingan kepada	25, Ada namun tidak
				PTSP Pemda	terpogram = 10,
					Tidak ada = 0
				Menilai aktivitas	Ada dan terpogram =
				pendampingan kepada	25, Ada namun tidak
				Pelaku usaha	terpogram = 10,
				1 Sidira dodina	Tidak ada = 0
3	Koneksi Pemda	a.	Implementasi	Menilai ketersediaan SOP	Tersedia dan
		u.			
3			sistem OSS	nemanfaatan sistem OSS	diaiinakan = 05
	dengan sistem OSS.		sistem OSS	pemanfaatan sistem OSS	digunakan = 25,
3			sistem OSS sesuai kewenangannya	pemanfaatan sistem OSS	digunakan = 25, Ada, belum

			digunakan = 10, Tidak ada = 0
b	Implementasi sistem pendukung sistem OSS	Menilai ketersediaan SOP pemanfaatan sistem pendukung sistem OSS	Tersedia dan digunakan = 25, Ada, belum digunakan = 10, Tidak ada = 0
		Menilai koneksi sistem pendukung sistem OSS dengan sistem OSS	Integrasi = 25, Koneksi = 10 Tidak ada = 0
С	Evaluasi implementasi	Menilai ketersediaan agenda evaluasi terhadap pemanfaatan sistem OSS	Tersedia dan terjadwal = 25, Tersedia namun tidak terjadwal = 10, Tidak tersedia = 0
		Menilai ketersediaan agenda evaluasi terhadap pemanfaatan sistem pendukung sistem OSS	Tersedia dan terjadwal = 25, Tersedia namun tidak terjadwal = 10, Tidak tersedia = 0

Ttd.

LAMPIRAN VI

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN

MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2020

**TENTANG** 

PENILAIAN KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA PEMERINTAH DAERAH SERTA KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

#### **BERITA ACARA**

# HASIL PENILAIAN KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA PEMERINTAH DAERAH TAHUN .....

Nomor Berita Acara : .....

Lampiran : 1. Daftar Hadir

2. Rekapitulasi Hasil Penilaian Mandiri yang telah Diverifikasi, Hasil Penilaian Pemangku Kepentingan dan Hasil Penilaian lain untuk Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pemerintah Daerah;

3. Rekapitulasi Hasil Penilaian Mandiri yang telah Diverifikasi untuk Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah.

Pada hari ini ....., tanggal ....., bulan ....., tahun ....., di ...., yang bertandatangan di bawah ini, atas nama Tim Penilai Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga tahun ..... adalah Ketua Tim Penilai Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga tahun ..... membuat Berita Acara:

- 1. Hasil Penilaian Mandiri Yang Telah Diverifikasi dan Hasil Penilaian Pemangku Kepentingan untuk Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah; dan
- 2. Hasil Penilaian Mandiri Yang Telah Diverifikasi untuk Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah,

tahun .....

Demikianlah Berita Acara ini beserta lampirannya dibuat, agar dapat digunakan sebagai pedoman penetapan Nomine Pemerintah Daerah untuk proses penilaian selanjutnya.

Ketua Tim Penilai Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga

Tanda tangan

(Nama Lengkap)

### Lampiran Berita Acara I

#### **DAFTAR HADIR**

# TIM PENILAI PENILAIAN KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA PEMERINTAH DAERAH SERTA KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

#### TAHUN ....

No.	Nama	Instansi/Lembaga	Jabatan Dalam Tim Penilai	Tanda Tangan
			••••	

Lampiran Berita Acara 2

# REKAPITULASI HASIL PENILAIAN MANDIRI YANG TELAH DIVERIFIKASI, HASIL PENILAIAN PEMANGKU KEPENTINGAN DAN HASIL PENILAIAN LAIN UNTUK KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH DAERAH

#### TAHUN .....

I. Rekapitulasi Hasil Penilaian Mandiri Yang Telah Diverifikasi dan Hasil Penilaian Pemangku Kepentingan untuk Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi

No.	Nama	Nomenklatur	Hasil	Penilaian	Hasil	Penilaian	Pemangku
	Provinsi		Mandiri	Yang	Kepen	tingan	(Organisasi
			Telah Di	verifikasi	Pengu	saha)	
••••							

II. Rekapitulasi Hasil Penilaian Mandiri Yang Telah Diverifikasi dan Hasil Penilaian Pemangku Kepentingan untuk Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Kabupaten

No.	Nama	Nomenklatur	Hasil Penilaian	Hasil P	enilaian
	Kabupaten		Mandiri Yang	Pemangku	
			Telah Diverifikasi	Kepentingan	
				PTSP	Organisasi
				Pemda	Pengusaha
				Provinsi	
••••			••••	••••	••••

## III. Rekapitulasi Hasil Penilaian Mandiri Yang Telah Diverifikasi dan Hasil Penilaian Pemangku Kepentingan untuk Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Kota

No.	Nama	Nomenklatur	Hasil Penilaian	Hasil Penilaian	
	Kota		Mandiri Yang	Pemangku	
			Telah Diverifikasi	Kepentingan	
				PTSP	Organisasi
				Pemda	Pengusaha
				Provinsi	
	••••			••••	••••

#### Lampiran Berita Acara 3

#### **REKAPITULASI HASIL**

## PENILAIAN MANDIRI YANG TELAH DIVERIFIKASI UNTUK KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA PEMERINTAH DAERAH

$\mathbf{T}_{I}$	Α.	u	TI	TAT				
11	Μ.	п	u	1.4	٠	٠	٠	٠

I.	Rekapitulasi	Hasil	Penilaian	Mandiri	Yang	Telah	Diverifikas	i untuk
	Kinerja Perce	patan	Pelaksana	an Berus	aha Pe	emerint	ah Daerah I	Provinsi

No	Nama Provinsi	Hasil Penilaian Mandiri Yang Telah Diverifikasi
••••	••••	

II. Rekapitulasi Hasil Penilaian Mandiri Yang Telah Diverifikasi untuk Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Kabupaten

No.	Nama Kabupaten	Hasil Penilaian Mandiri Yang Telah Diverifikasi
	••••	••••

III. Rekapitulasi Hasil Penilaian Mandiri Yang Telah Diverifikasi untuk Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Kota

No.	Nama Kota	Hasil Penilaian Mandiri Yang Telah Diverifikasi
	••••	

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

LAMPIRAN VII

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PENILAIAN KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA PEMERINTAH DAERAH SERTA KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

#### PENILAIAN MANDIRI UNTUK KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA (PPB) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

	Kriteria Penilaian	In	ndikator Penilaian	Tolok Ukur Penilaian (Bagaimana setiap indikator dinilai)	Bobot Penilaian (Bagaimana setiap indikator diberi skor)
1	Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria perizinan berusaha sesuai kewenangannya yang diamanatkan oleh peraturan	a.	Norma, standar, prosedur dan kriteria perizinan berusaha melalui sistem OSS	Menilai ada tidaknya dokumen norma, standar, prosedur dan kriteria Perizinan Berusaha melalui sistem OSS Menilai aksesibilitas dokumen norma,	Ada lengkap =25, Tidak ada =0  Dapat diakses publik = 25,
	perundang- undangan di bidang percepatan pelaksanaan berusaha serta			standar, prosedur dan kriteria Perizinan Berusaha melalui sistem OSS	Dapat diakses dengan otorisasi =10, Tidak dapat diakses =0
	peraturan pelaksanaan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	b.	Norma, standar, prosedur dan kriteria perizinan berusaha melalui sistem pendukung	Menilai ada tidaknya dokumen norma, standar, prosedur dan kriteria Perizinan Berusaha melalui sistem pendukung sistem OSS	Ada =10, Tidak ada =0
			sistem OSS	Menilai aksesibilitas dokumen norma, standar, prosedur dan kriteria Perizinan Berusaha melalui sistem pendukung sistem OSS	Dapat diakses publik = 25, Dapat diakses dengan otorisasi =10, Tidak dapat diakses =0
		c.	Evaluasi implementasi norma, standar, prosedur dan kriteria perizinan berusaha	Menilai ada tidaknya dokumen evaluasi norma, standar, prosedur dan kriteria Perizinan Berusaha melalui sistem OSS	Ada =10, Tidak ada =0

			T		1
				Menilai aksesibilitas	Dapat diakses publik
				dokumen evaluasi	= 25,
				norma, standar,	Dapat diakses
				prosedur dan kriteria	dengan otorisasi
				Perizinan Berusaha	=10,
				melalui sistem OSS	Tidak dapat diakses = 0.
				Menilai ada tidaknya	Ada =10,
				dokumen evaluasi	Tidak ada =0
				norma, standar,	
				prosedur dan kriteria	
				Perizinan Berusaha	
				melalui sistem	
				pendukung sistem OSS	
				Menilai aksesibilitas	Dapat diakses publik
				dokumen evaluasi	= 25,
				norma, standar,	Dapat diakses
				prosedur dan kriteria Perizinan Berusaha	dengan otorisasi =10,
				melalui sistem	Tidak dapat diakses
				pendukung sistem OSS	= 0.
		d.	Tindak lanjut	Menilai dokumen tindak	Ada = 10,
		~.	evaluasi	lanjut evaluasi norma,	Tidak ada =0
				standar, prosedur dan	
				kriteria Perizinan	
				Berusaha melalui sistem	
				OSS	10
				Menilai dokumen tindak	Ada = 10,
				lanjut evaluasi norma,	Tidak ada =0
				standar, prosedur dan kriteria Perizinan	
				Berusaha melalui sistem	
				pendukung sistem OSS	
2	Reformasi	a.	Organisasi dan	Menilai ketersediaan tim	Tersedia dengan SK
4	pelaksanaan	a.	program kerja	teknis internal	= 25, Tersedia tanpa
	perizinan berusaha		program Kerja	tekins internal	SK = 10, Tidak
	dan pengawalan				tersedia = 0
	realisasinya sesuai			Menilai operasional tim	Selama hari kerja =
	ketentuan peraturan			teknis internal	25, 2-4 hari kerja =
	perundang-			tekins internal	10, 1 hari kerja = 5,
	undangan				Tidak ada = 0
	andangan			Menilai kecukupan dan	Cukup dan ada
				keterwakilan Tim Teknis	keterwakilan = 25,
ĺ		1			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
				Internal	Cukun namun
				Internal	Cukup namun kurana ada
				Internal	kurang ada
				Internal	kurang ada keterwakilan = 10,
					kurang ada keterwakilan = 10, Tidak cukup = 5
				Menilai ketersediaan	kurang ada keterwakilan = 10, Tidak cukup = 5 Ada dan sangat
				Menilai ketersediaan program kerja dalam	kurang ada keterwakilan = 10, Tidak cukup = 5 Ada dan sangat jelas = 25, Ada,
				Menilai ketersediaan program kerja dalam rangka reformasi	kurang ada keterwakilan = 10, Tidak cukup = 5 Ada dan sangat jelas = 25, Ada, kurang jelas = 10,
				Menilai ketersediaan program kerja dalam rangka reformasi perizinan berusaha	kurang ada keterwakilan = 10, Tidak cukup = 5 Ada dan sangat jelas = 25, Ada, kurang jelas = 10, Tidak ada = 0
				Menilai ketersediaan program kerja dalam rangka reformasi perizinan berusaha Menilai ada tidaknya	kurang ada keterwakilan = 10, Tidak cukup = 5 Ada dan sangat jelas = 25, Ada, kurang jelas = 10, Tidak ada = 0 Ada dan rutin = 25,
				Menilai ketersediaan program kerja dalam rangka reformasi perizinan berusaha Menilai ada tidaknya koordinasi dengan 1.	kurang ada keterwakilan = 10, Tidak cukup = 5 Ada dan sangat jelas = 25, Ada, kurang jelas = 10, Tidak ada = 0 Ada dan rutin = 25, Ada, tidak rutin =
				Menilai ketersediaan program kerja dalam rangka reformasi perizinan berusaha Menilai ada tidaknya koordinasi dengan 1. Pimpinan K/L, 2. K/L	kurang ada keterwakilan = 10, Tidak cukup = 5 Ada dan sangat jelas = 25, Ada, kurang jelas = 10, Tidak ada = 0 Ada dan rutin = 25,
				Menilai ketersediaan program kerja dalam rangka reformasi perizinan berusaha Menilai ada tidaknya koordinasi dengan 1. Pimpinan K/L, 2. K/L lain, 3. Pemda, 4. PTSP	kurang ada keterwakilan = 10, Tidak cukup = 5 Ada dan sangat jelas = 25, Ada, kurang jelas = 10, Tidak ada = 0 Ada dan rutin = 25, Ada, tidak rutin =
				Menilai ketersediaan program kerja dalam rangka reformasi perizinan berusaha Menilai ada tidaknya koordinasi dengan 1. Pimpinan K/L, 2. K/L lain, 3. Pemda, 4. PTSP Pemda, terkait reformasi	kurang ada keterwakilan = 10, Tidak cukup = 5 Ada dan sangat jelas = 25, Ada, kurang jelas = 10, Tidak ada = 0 Ada dan rutin = 25, Ada, tidak rutin =
				Menilai ketersediaan program kerja dalam rangka reformasi perizinan berusaha Menilai ada tidaknya koordinasi dengan 1. Pimpinan K/L, 2. K/L lain, 3. Pemda, 4. PTSP Pemda, terkait reformasi perizinan berusaha	kurang ada keterwakilan = 10, Tidak cukup = 5 Ada dan sangat jelas = 25, Ada, kurang jelas = 10, Tidak ada = 0 Ada dan rutin = 25, Ada, tidak rutin = 10, Tidak ada = 0
				Menilai ketersediaan program kerja dalam rangka reformasi perizinan berusaha Menilai ada tidaknya koordinasi dengan 1. Pimpinan K/L, 2. K/L lain, 3. Pemda, 4. PTSP Pemda, terkait reformasi perizinan berusaha Menilai keberadaan	kurang ada keterwakilan = 10, Tidak cukup = 5  Ada dan sangat jelas = 25, Ada, kurang jelas = 10, Tidak ada = 0  Ada dan rutin = 25, Ada, tidak rutin = 10, Tidak ada = 0  Ada dan rutin = 25,
				Menilai ketersediaan program kerja dalam rangka reformasi perizinan berusaha Menilai ada tidaknya koordinasi dengan 1. Pimpinan K/L, 2. K/L lain, 3. Pemda, 4. PTSP Pemda, terkait reformasi perizinan berusaha	kurang ada keterwakilan = 10, Tidak cukup = 5 Ada dan sangat jelas = 25, Ada, kurang jelas = 10, Tidak ada = 0 Ada dan rutin = 25, Ada, tidak rutin = 10, Tidak ada = 0

	I		T.1 .1014	Tag 19 4 4 14 11	1 4 4 1
		b.	Identifikasi	Menilai aktivitas	Ada dan rutin = 25,
			peraturan	identifikasi peraturan	Ada, tidak rutin =
			perizinan	perizinan berusaha yang	10, Tidak ada = 0
			berusaha	perlu direformasi	
				Menilai aktivitas	Ada dan rutin = 25,
				identifikasi pelaksanaan	Ada, tidak rutin =
				perizinan berusaha yang	10, Tidak ada = 0
				perlu direformasi	
				Menilai aktivitas	Ada dan rutin = 25,
				identifikasi	Ada, tidak rutin =
				permasalahan terkait	10, Tidak ada = 0
				perizinan berusaha	10, Itaan aaa 0
		_	T	Menilai keberadaan	A -11 11
		c.	Inventarisasi		Ada dan lengkap=
			peraturan 	dokumentasi kegiatan	25, Ada, tidak
			perizinan		lengkap = 10 dan
			berusaha		Tidak ada = 0
				Menilai keberadaan	Ada dan lengkap=
1				dokumentasi identifikasi,	25, Ada, tidak
				evaluasi dan	lengkap = 10 dan
				pelaksanaan peraturan	Tidak ada = 0
				perizinan berusaha	<u> </u>
				Menilai aksesibilitas	Dapat diakses publik
				kegiatan dan laporan	= 25, Dapat diakses
				kegiatan	internal = 10, Tidak
					dapat diakses = 0
				Menilai penggunaan	Menggunakan
				teknologi informasi	teknologi informasi =
				dalam dokumentasi dan	25, Konvensional = 0
				inventarisasi	25, Konvensionai – 0
		-	D 1 :		A 1 1 1 .
		d.	Deregulasi	Menilai jumlah	Ada rekomendasi
			peraturan	rekomendasi yang telah	pada setiap
			perizinan	dikeluarkan dari daftar	identifikasi = 25,
			berusaha	identifikasi peraturan	Ada rekomendasi
				perizinan berusaha	pada sebagian
					identifikasi = 10,
					Tidak ada
					rekomendasi = 0
		f.	Debirokratisasi	Menilai aktivitas	Ada dan rutin = 25,
			peraturan	mendorong kemudahan	Ada, tidak rutin =
			perizinan	perizinan berusaha	10, Tidak ada = 0
			berusaha	Menilai aktivitas terkait	Ada dan rutin = 25,
				upaya mengurangi	Ada, tidak rutin =
				waktu/biaya perizinan	10, Tidak ada = 0
				berusaha	
				Menilai aktivitas	Ada dan sistematis =
				pengawasan dalam	25, Ada namun tidak
				pelaksanaan perizinan	sistematis = 10,
				berusaha	Tidak ada = 0
				Menilai aktivitas	Ada dan terpogram =
				pendampingan kepada	25, Ada namun tidak
1				PTSP Pemda	terpogram = 10,
1				r i Sr reiliua	terpogram = 10, Tidak ada = 0
				Moniloi olatissitos	
				Menilai aktivitas	Ada dan terpogram =
1				pendampingan kepada	25, Ada namun tidak
				Pelaku usaha	terpogram = 10,
					Tidak ada = 0
3	Koneksi	a.	Implementasi	Menilai ketersediaan SOP	Tersedia dan
1	Kementerian		sistem OSS	pemanfaatan sistem OSS	digunakan = 25,
	Negara/Lembaga		sesuai		Ada, belum
	dengan sistem OSS.		kewenangannya		
				•	

				digunakan = 10, Tidak ada = 0
	b.	Implementasi	Menilai ketersediaan SOP	Tersedia dan
		sistem	pemanfaatan sistem	digunakan = 25,
		pendukung	pendukung sistem OSS	Ada, belum
		sistem OSS		digunakan = 10,
				Tidak ada = 0
			Menilai koneksi sistem	Integrasi = 25,
			pendukung sistem OSS	Koneksi = 10
			dengan sistem OSS	Tidak ada = 0
	С	Evaluasi	Menilai ketersediaan	Tersedia dan
		implementasi	agenda evaluasi terhadap	terjadwal = 25,
			pemanfaatan sistem OSS	Tersedia namun
				tidak terjadwal = 10,
				Tidak tersedia = 0
			Menilai ketersediaan	Tersedia dan
			agenda evaluasi terhadap	terjadwal = 25,
			pemanfaatan sistem	Tersedia namun
			pendukung sistem OSS	tidak terjadwal = 10,
				Tidak tersedia = 0

Ttd.

LAMPIRAN VIII

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN

MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2020

**TENTANG** 

PENILAIAN KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA PEMERINTAH DAERAH SERTA KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

#### **BERITA ACARA**

# HASIL PENILAIAN KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

#### TAHUN .....

Nomor Berita Acara : ....

Lampiran : 1. Daftar Hadir

 Rekapitulasi Hasil Penilaian Mandiri yang telah Diverifikasi untuk Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian

Negara/Lembaga.

Pada hari ini ....., tanggal ....., bulan ....., tahun ....., di ...., yang bertandatangan di bawah ini, atas nama Tim Penilai Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga tahun ..... adalah Ketua Tim Penilai Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga tahun ..... membuat Berita Acara Hasil Penilaian Mandiri Yang Telah Diverifikasi untuk Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga tahun .....

Demikianlah Berita Acara ini beserta lampirannya dibuat, agar dapat digunakan sebagai pedoman penetapan Nomine Kementerian Negara/Lembaga untuk proses penilaian selanjutnya.

Ketua Tim Penilai Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga

Tanda tangan

(Nama Lengkap)

### Lampiran Berita Acara I

#### DAFTAR HADIR

## TIM PENILAI PENILAIAN KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA PEMERINTAH DAERAH SERTA KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

#### TAHUN .....

No.	Nama	Instansi/Lembaga	Jabatan Dalam Tim Penilai	Tanda Tangan
	••••	•••••	••••	••••

#### Lampiran Berita Acara 2

# REKAPITULASI HASIL

### PENILAIAN MANDIRI YANG TELAH DIVERIFIKASI UNTUK KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA PEMERINTAH DAERAH

ТΔ	HUN	
10	11014	

I. Rekapitulasi Hasil Penilaian Mandiri Yang Telah Diverifikasi untuk Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Provinsi

No	Nama Provinsi	Hasil Penilaian Mandiri Yang Telah Diverifikasi		
••••				

II. Rekapitulasi Hasil Penilaian Mandiri Yang Telah Diverifikasi untuk Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Kabupaten

No.	Nama Kabupaten	Hasil Penilaian Mandiri Yang Telah Diverifikasi		
	••••	••••		

III. Rekapitulasi Hasil Penilaian Mandiri Yang Telah Diverifikasi untuk Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Kota

No.	Nama Kota	Hasil Penilaian Mandiri Yang Telah Diverifikasi
	••••	

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

LAMPIRAN IX

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PENILAIAN KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA PEMERINTAH DAERAH SERTA KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

KRITERIA PENILAIAN PAPARAN PEMDA DAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

n iap kor) gan ok d d
kor) gan sk  d  ed
gan ok d od vah
k d ed vah
d ed vah
sd vah
sd vah
vah
vah
vah
n
İ
gan
ik
sd
sd
vah
n
gan
k
5 sd
sd
69,9),
,-,,

				digital, maupun bukti fisik dalam paparan)	Tidak valid (dibawah 65) > Ada panduan kelompok nilai ini.
2	Pemaparan	a.	Teknik penyampaian paparan	Visualisasi bahan presentasi	Skor 1 sd 100, dengan pembagian kelompok skor: Sangat Bagus (85 sd 100), Bagus (70 sd 84,9), Kurang Bagus (65 sd 69,9), dan Tidak Bagus (dibawah 65)> Ada panduan kelompok nilai ini.
				Cara penyampaian pesan  Penggunaan properti	Skor 1 sd 100, dengan pembagian kelompok skor: Sangat Bagus (85 sd 100), Bagus (70 sd 84,9), Kurang Bagus (65 sd 69,9), dan Tidak Bagus (dibawah 65)> Ada panduan kelompok nilai ini. Skor 1 sd 100, dengan
				(media komunikasi) presentasi	pembagian kelompok skor: Sangat bagus (85 sd 100), Bagus (70 sd 84,9), Kurang bagus (65 sd 69,9), dan Tidak bagus (dibawah 65)> Ada panduan kelompok nilai ini.
				Penguasaan materi yang dipresentasikan	Skor 1 sd 100, dengan pembagian kelompok skor: Sangat menguasai (85 sd 100), Menguasai (70 sd 84,9), Kurang menguasai (65 sd 69,9), dan Tidak menguasai (dibawah 65)> Ada panduan kelompok nilai ini.
				Ketepatan jawaban atas pertanyaan yang diberikan	Skor 1 sd 100, dengan pembagian kelompok skor: Sangat tepat (85 sd 100), Tepat (70 sd 84,9), Kurang Tepat (65 sd 69,9), dan Tidak menguasai (dibawah 65)> Ada panduan kelompok nilai ini.

		b.	Teknik penyusunan paparan	Menilai kesesuaian dengan <i>template</i> paparan yang sudah ditetapkan	Skor 1 sd 100, dengan pembagian kelompok skor: Sangat Sesuai (85 sd 100), Sesuai (70 sd 84,9), Kurang Sesuai (65 sd 69,9), dan Tidak Sesuai (dibawah 65)> Ada panduan kelompok nilai ini.
3	Waktu paparan	a.	Alokasi waktu	Menilai ketepatan waktu paparan sesuai dengan waktu yang diberikan	Skor 1 sd 100, dengan pembagian kelompok skor : Sangat tepat (85 sd 100), Tepat (70 sd 84,9), Kurang Tepat (65 sd 69,9), dan Tidak tepat (dibawah 65)> Ada panduan kelompok nilai ini.
		b.	Efisiensi waktu	Menilai efsiensi waktu dalam menjawab setiap pertanyaan/ tanggapan	Skor 1 sd 100, dengan pembagian kelompok skor : Sangat Efisien (85 sd 100), Efisien (70 sd 84,9), Kurang Efisien (65 sd 69,9), dan Tidak Efisien (dibawah 65)> Ada panduan kelompok nilai ini.

Ttd.

LAMPIRAN X
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
PENILAIAN KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU

PENILAIAN KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA PEMERINTAH DAERAH SERTA KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

#### KRITERIA PENILAIAN UJI PETIK KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

Kriteria Penilaian		Indikator Penilaian		Tolok Ukur Penilaian (Bagaimana setiap indikator dinilai)	Bobot Penilaian (Bagaimana setiap indikator diberi skor)
1	Kesesuaian data dan dokumen pendukung penilaian mandiri dengan kondisi faktual di lapangan	a.	Ketersediaan data dan dokumen pendukung penilaian mandiri	Menilai ketersediaan data dan dokumen pendukung serta kualitas penyediaan dan organisasi dokumen dimaksud.	Skor 1 sd 100, dengan pembagian kelompok skor: Tersedia Sangat Baik dan Sangat terorganisir dan Terkoneksi Penuh (85 sd 100), Baik dan Terorganisir (70 sd 84,9), Kurang Baik dan Terorganisir (65 sd 69,9), dan Tidak Baik dan Terorganisir (dibawah 65)> Ada panduan kelompok nilai ini
		b.	Kesesuaian pelaksanaan	Menilai kualitas kesesuain antara dokumen dengan pelaksanaan di lapangan	Skor 1 sd 100, dengan pembagian kelompok skor : Sangat sesuai (85 sd 100), Sesuai (70 sd 84,9), Kurang Sesuai (65 sd 69,9), dan Tidak Sesuai (dibawah 65) > Ada panduan kelompok nilai ini
2	Implementasi sistem perizinan berusaha	a.	Kualitas implementasi sistem OSS	Menilai kualitas implementasi penggunaan sistem OSS.	Skor 1 sd 100, dengan pembagian kelompok skor: Implementasi Penuh (85 sd 100), Implementasi Sebagian besar (70 sd 84,9), Implementasi sebagian kecil (65 sd 69,9), dan Belum implementasi (menggunakan sistem sendiri dan ditindak lanjut ke OSS) (dibawah 65)> Ada panduan kelompok nilai ini

	b.	Kualitas	Menilai kualitas	Skor 1 sd 100, dengan
	"	implementasi	implementasi sistem	pembagian kelompok skor :
		_	_	
		sistem pendukung	untuk mendukung	Sistem terkoneksi penuh
		sistem OSS	sistem OSS	dengan OSS (85 sd 100),
				Sistem terkoneksi Sebagian
				besar (70 sd 84,9),
				Sistem terkoneksi sebagian
				kecil (65 sd 69,9), dan
				Sistem Belum terkoneksi
				(menggunakan sistem sendiri
				dan ditindak lanjut ke OSS)
				(dibawah 65)> Ada
				panduan kelompok nilai ini

Ttd.

LAMPIRAN XI
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG

PENILAIAN KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA PEMERINTAH DAERAH SERTA KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

#### KRITERIA PENILAIAN UJI PETIK PEMDA

				Tolok Ukur Penilaian	Bobot Penilaian
17.	mitamia Damilaian	Tan	ndikator Penilaian		
K	Kriteria Penilaian		idikator Pennalan	(Bagaimana setiap	(Bagaimana setiap
_			77 . 11	indikator dinilai)	indikator diberi skor)
1	Kesesuaian	a.	Ketersediaan data	Menilai ketersediaan	Skor 1 sd 100, dengan
	data dan		dan dokumen	data dan dokumen	pembagian kelompok
	dokumen		pendukung	pendukung serta	skor:
	pendukung		penilaian mandiri	kualitas penyediaan	Tersedia Sangat Baik
	dengan kondisi			dan organisasi	dan Sangat terorganisir
	faktual di			dokumen dimaksud.	dan Terkoneksi Penuh
	lapangan				(85 sd 100),
					Baik dan Terorganisir
					(70 sd 84,9),
					Kurang Baik dan
					Terorganisir (65 sd 69,9),
					dan
					Tidak Baik dan
					Terorganisir (dibawah
					65)> Ada panduan
					kelompok nilai ini
		b.	Kesesuaian	Menilai kualitas	Skor 1 sd 100, dengan
			pelaksanaan	kesesuain antara	pembagian kelompok
				dokumen dengan	skor:
				pelaksanaan di	Sangat sesuai (85 sd
				lapangan	100),
					Sesuai (70 sd 84,9),
					Kurang Sesuai (65 sd
					69,9), dan
					Tidak Sesuai (dibawah
					65)> Ada panduan
					kelompok nilai ini
2	Implementasis	a.	Kualitas	Menilai kualitas	Skor 1 sd 100, dengan
	tem perizinan		implementasi	implementasi	pembagian kelompok
	berusaha		sistem OSS	penggunaan sistem	skor:
				OSS.	Implementasi Penuh (85
					sd 100),
					Implementasi Sebagian
					besar (70 sd 84,9),
					Implementasi sebagian
					kecil (65 sd 69,9), dan
					Belum implementasi
					(menggunakan sistem

				sendiri dan ditindak lanjut ke OSS) (dibawah 65)> Ada panduan kelompok nilai ini
	b.	Kualitas implementasi sistem pendukung sistem OSS	Menilai kualitas implementasi sistem untuk mendukung sistem OSS	Skor 1 sd 100, dengan pembagian kelompok skor: Sistem terkoneksi penuh dengan OSS (85 sd 100), Sistem terkoneksi Sebagian besar (70 sd 84,9), Sistem terkoneksi sebagian kecil (65 sd 69,9), dan Sistem Belum terkoneksi (menggunakan sistem sendiri dan ditindak lanjut ke OSS) (dibawah 65)> Ada panduan kelompok nilai ini

Ttd.